

ANALISIS UPAYA ASEAN DALAM MEMBERANTAS DISTRIBUSI NARKOTIKA DI WILAYAH ASIA TENGGARA

Rama Putra Primawardana

Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jawa Timur

Praja Firdaus N

Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jawa Timur

Abstrak: Pada era globalisasi ini semakin marak terjadi kejahatan transnasional yang dapat mengancam keamanan negara, salah satunya adalah distribusi obat-obatan ilegal terutama di kawasan Asia Tenggara. *Drug-Free ASEAN* merupakan salah satu upaya inisiatif regional yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Dengan melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN, program ini didasarkan pada kerjasama lintas batas untuk mengatasi tantangan kompleks yang terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Abstrak ini membahas landasan filosofis dan tujuan strategis dari inisiatif *Drug-Free ASEAN*. Metode kerja sama antarnegara, seperti pertukaran intelijen, penguatan perbatasan, dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, menjadi sorotan utama dalam usaha mencapai target bebas narkoba. Selain itu, disoroti juga upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui edukasi masyarakat, rehabilitasi, dan pengembangan program kesehatan mental. Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan masyarakat bebas narkoba juga diperincikan. Faktor ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi peredaran narkoba menjadi fokus analisis, bersama dengan upaya bersama untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang dampak narkoba terhadap individu dan masyarakat.

Kata Kunci: ASEAN, Penyalahgunaan narkoba, Drug-Free ASEAN

Abstract: In this era of globalization, transnational crimes are increasingly occurring that can threaten state security, one of which is the distribution of illegal drugs, especially in the Southeast Asian region. *Drug-Free ASEAN* is a regional initiative that aims to create a society free from drug abuse in the Southeast Asian region. Involving ten ASEAN member states, the program is based on cross-border cooperation to address the complex challenges associated with drug trafficking and abuse. This abstract discusses the philosophical foundation and strategic objectives of the *Drug-Free ASEAN* initiative. Methods of cross-border cooperation, such as intelligence sharing, border strengthening, and capacity building of law enforcement agencies, are highlighted in an effort to achieve drug-free targets. In addition, efforts to prevent drug abuse through community education, rehabilitation, and the development of mental health programs were highlighted. The challenges and obstacles faced in realizing a drug-free society are

also detailed. Economic, social and political factors that influence drug trafficking are the focus of analysis, along with concerted efforts to build a better understanding of the impact of drugs on individuals and society.

Keywords: ASEAN, Drug abuse, Drug-Free ASEAN

Article History: *Received 15 March 2024, Revised: 01 mei 2024, Accepted: 06 May 2024, Available online 01 July 2024*

PENDAHULUAN

Batas-batas wilayah negara di zaman modern ini semakin kabur dari batas wilayah utama yang telah ditentukan, karena banyaknya ruang baru yang muncul karena perkembangan teknologi. Batas wilayah negara memiliki peran yang penting untuk dapat lebih mengetahui titik lemah suatu wilayah perbatasan untuk mencegah terjadinya kejahatan lintas batas negara atau disebut juga kejahatan transnasional yang dapat mengancam keamanan negara secara nasional maupun internasional. *Transnational organized crime* (TOC) atau kejahatan transnasional merupakan tindak kejahatan lintas batas negara yang menyangkut dua negara atau lebih. Istilah kejahatan transnasional yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1990-an dalam *The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* merupakan hasil perkembangan dari istilah *organized crime*.¹ Dengan semakin berkembangnya ruang-ruang baru pada batas wilayah negara, membuat negara-negara kawasan Asia Tenggara sadar akan pentingnya meminimalisir terjadinya tindak kejahatan transnasional terutama pada sektor narkotika.

Seiring dengan perkembangan zaman globalisasi, peredaran narkoba tidak lagi bersifat perorangan akan tetapi telah berkembang menjadi jaringan berskala besar yang terorganisir dan memiliki skala perdagangan yang bersifat transnasional atau dikenal sebagai '*transnational organized crime*' yang dapat mengancam keamanan negara.² Sebagai salah satu

¹ Wagley, *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses* (Congressional Research Service, The Library of Congress, 2006).

² UNODC, *Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact* (UNODC, UNODC Research, 2019), 6.

organisasi regional yang mewakili wilayah Asia Tenggara di kancah internasional, negara-negara anggota *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) berupaya untuk menanggulangi permasalahan mengenai peredaran narkoba dengan menyepakati persetujuan pembuatan *Joint Declaration for a Drug-Free ASEAN 2015* bersama negara-negara ASEAN lainnya yang bertekad untuk menangani peredaran narkoba di wilayah Asia Tenggara. Melihat kawasan Asia Tenggara terutama perbatasan Myanmar, Laos, dan Thailand atau disebut juga *Golden Triangle* merupakan salah satu dari beberapa kawasan penghasil narkoba terbesar di dunia dibawah Kolombia, Bolivia, dan Peru yang biasa disebut wilayah *Golden Peacock* serta Iran, Afghanistan, dan Pakistan yang sering disebut wilayah *Golden Crescent*.³

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, karena dapat membantu dalam proses penjelasan analisis upaya dalam mencapai suatu tujuan dari topik yang diangkat secara menyeluruh. Penelitian deskriptif bertujuan memaparkan secara tepat sifat yang dimiliki setiap individu, keadaan, atau frekuensi hubungan spesifik antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam suatu fenomena. Perbedaan yang dapat dilihat apabila memakai tipe penelitian eksplanatif adalah pemaparan data yang harus mendapatkan kesimpulan atau hasil akhir dari suatu fenomena, maka dari itu tipe penelitian deskriptif lebih cocok digunakan dalam memaparkan informasi dari sudut pandang peneliti secara berurutan.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder yang telah tersedia di kalangan umum. Data sekunder dapat lebih membantu mempermudah analisa penelitian secara efektif dan menyeluruh. Data sekunder dapat diperoleh dari tangan kedua pemilik sumber data dan dapat berasal dari dokumen, jurnal, buku, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Teknik analisis data yang dapat digunakan untuk melakukan analisis secara mendalam adalah kualitatif, karena fenomena atau topik

³ Lintner Bertil, *The golden triangle opium trade: An overview. Asia Pacific Media Services* (Chiang Mai: 2000), 9-10.

yang diangkat penulis memerlukan perspektif khusus dalam menganalisis perilaku objek yang diamati, agar mendapatkan hasil kesimpulan yang maksimal. Penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan, menyelidiki dan menggambarkan keistimewaan dari fenomena sosial yang tidak dapat dipahami maupun dinilai menggunakan pendekatan kuantitatif.⁴ Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, peneliti dapat lebih melihat perilaku berbagai objek yang bersangkutan dengan fenomena yang diangkat dan dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif maupun deduktif.

HASIL PENELITIAN

Data yang dipaparkan merupakan hasil dari analisa peneliti dalam menganalisa data yang telah dipublikasikan oleh ASEAN mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan peredaran narkotika dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dapat di analisa untuk melihat perkembangan upaya yang telah dilakukan adalah inisiasi program Drug-Free ASEAN yang berkembang secara signifikan dalam menangani permasalahan ini. Terdapat konsep yang relevan sebagai landasan utama ASEAN untuk menerapkan upaya-upaya pemberantasan, yaitu konsep counter-narcotics dari Osmaniolen yang lebih memperhatikan hubungan kerjasama antar negara kawasan, para pelaku tindak kejahatan dan treatment untuk para pelaku pasca dijatuhkan hukuman negara. Kolaborasi yang dilakukan oleh ASEAN dengan berbagai badan ASEAN yang relevan, dapat dikatakan efektif untuk memancing ambisi negara anggota agar semakin memperhatikan masalah yang dihadapi. Letak geografis negara-negara anggota ASEAN yang unik, menjadi sebuah tantangan bagi setiap negara untuk menjaga perbatasan wilayah yang menjadi titik utama distribusi narkotika. Salah satunya adalah Indonesia sebagai negara yang telah menjadi tempat transit barang-barang terlarang tersebut.

Indonesia sebagai salah satu contoh anggota ASEAN yang berupaya untuk menerapkan serta mengimplikasikan rekomendasi tindakan yang cocok untuk mengatasi permasalahan narkotika. Dengan berbagai upaya yang telah direkomendasikan oleh ASEAN dalam program kerja

⁴ Saryono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. ASIfabeta, 2010), 5.

terbaru, Indonesia telah mengupayakan beberapa program sejak program Drug-Free ASEAN 2009-2015 sampai program selanjutnya. Upaya-upaya yang dilakukan telah mencakup beberapa komponen dari teori Osmanirole yang lebih berfokus pada penguatan keamanan nasional yang dapat berdampak signifikan pada keamanan regional. Peningkatan "good will" dan ketegasan Presiden dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan elemen penting dalam membentuk kebijakan yang efektif. Ketegasan seorang pemimpin dapat memberikan dorongan moral dan inspirasi kepada aparat penegak hukum serta seluruh masyarakat. Apabila Presiden menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penanganan narkoba, ini dapat memicu perubahan sikap dan perilaku di tingkat eksekutif dan legislatif. Langkah-langkah tegas dan konsisten dari pucuk pimpinan negara juga dapat menciptakan efek pencegahan dan memberikan contoh positif bagi generasi muda.

Untuk memaksimalkan upaya-upaya yang dilakukan, diperlukan kondisi lingkungan sosial yang terbuka agar dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Maka dari itu, Observasi terhadap kematangan lingkungan sosial mencakup seberapa baik masyarakat memahami dampak penyalahgunaan narkoba dan sejauh mana mereka terlibat dalam mendukung program pencegahan dan rehabilitasi. Keterbukaan ini mencakup tingkat kesadaran masyarakat, dukungan terhadap inisiatif pencegahan, serta pemahaman tentang cara menyikapi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Upaya untuk menciptakan kesadaran dan edukasi masyarakat merupakan langkah kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Indonesia berusaha merubah arah kebijakan dari pendekatan "kriminalisasi" ke "dekriminalisasi" mencerminkan evolusi dalam pandangan terhadap penanganan penyalahgunaan narkoba.⁵ Basis regulasi yang kokoh dan responsif terhadap dinamika perkembangan narkoba menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih efektif. Perubahan arah kebijakan menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada kesehatan dan

⁵ Letizia Charissa Sigalingging, Upaya Indonesia Mewujudkan Drug-Free ASEAN 2015 (Pekanbaru: 2015), 4.

rehabilitasi menunjukkan pemahaman bahwa penanganan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan hukuman, melainkan juga memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Keputusan untuk mendekriminalisasi atau memandang penyalahgunaan narkoba sebagai masalah kesehatan masyarakat mencerminkan transformasi paradigma dalam penanganan narkoba. Melalui peningkatan upaya kombinasi tiga elemen *good will* dan ketegasan Presiden, kematangan lingkungan sosial, serta basis regulasi dan perubahan arah kebijakan. Indonesia dapat menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba dengan cara yang lebih efektif, mendorong pencegahan, penanganan kesehatan, dan rehabilitasi. Langkah-langkah ini akan memperkuat fondasi upaya penanggulangan narkoba dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan upaya pemerintah dalam menguatkan BNN sebagai *law enforcement* yang menjadi kekuatan utama dari Indonesia, tugas yang dilakukan memiliki beberapa perubahan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu fokus utama BNN adalah mengurangi budidaya tanaman ilegal yang digunakan sebagai bahan baku untuk narkoba. Ini mencakup upaya pencegahan dan pemusnahan tanaman seperti ganja dan tanaman lain yang dapat diolah menjadi narkoba. Langkah-langkah ini melibatkan kerjasama dengan instansi lain, petani, dan komunitas lokal untuk mengidentifikasi, memantau, dan memberikan edukasi tentang dampak negatif budidaya tanaman ilegal. Selain itu, BNN juga dapat terlibat dalam pengembangan alternatif ekonomi bagi petani yang sebelumnya terlibat dalam budidaya tanaman ilegal. Maka dari itu, dapat dikatakan berbagai upaya yang telah dikembangkan oleh ASEAN di dalam program kerja terbarunya yaitu *Drug-Free ASEAN 2016-2025* berhasil memberikan dampak positif bagi salah satu negara anggotanya dan diharap negara anggota lainnya dapat berkembang seperti Indonesia.

DISKUSI

Peredaran narkoba telah menjadi isu global yang menarik perhatian serius dari masyarakat internasional. Dampaknya mencakup kerusakan terhadap generasi penerus bangsa dan mempengaruhi berbagai aspek sosial, politik, serta ekonomi, mulai dari tingkat personal hingga tingkat negara. Oleh karena itu, perdagangan narkoba dianggap sebagai tindak kejahatan

yang sangat serius bagi setiap individu. Di Asia Tenggara, peredaran narkoba dianggap sebagai ancaman nyata terhadap keamanan dan stabilitas negara dan wilayah tersebut. Dengan maraknya masalah tersebut, negara-negara di wilayah Asia Tenggara mulai memperhatikan permasalahan ini dengan mengusulkan sebuah program kerja baru pada Asean Ministerial Meeting (AMM) ke-31 di tahun 1998 yaitu Drug-Free ASEAN yang bertujuan memberantas peredaran narkoba sampai batas tahun 2020. Fokus utama program kerja ini adalah mencapai status 'Drug-Free Asean'. Untuk mencapai tujuan ini, ASEAN perlu berhasil dan efektif dalam menangani kegiatan penggunaan obat-obatan terlarang serta mengurangi dampak negatifnya pada masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui langkah-langkah seperti mengurangi secara signifikan tanaman ilegal dan mempromosikan budidaya yang berkelanjutan, memerangi perdagangan dan produksi gelap obat-obatan terlarang, serta mengatasi kejahatan terkait narkoba. Namun, pada Asean Ministerial Meeting on Drugs (AMMD) di tahun 2016 program kerja tersebut diperbarui menjadi ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025. The ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) telah menjadi lembaga kunci dalam mengatasi isu terkait narkoba di kawasan Asia Tenggara, ASOD berperan sebagai entitas utama yang mengawasi implementasi Rencana Aksi ASEAN terkait Keamanan Masyarakat dari Narkoba 2016-2025.⁶ Lebih lanjut, ASOD diperkuat oleh kelima kelompok tugas, meliputi Sosialisasi Pencegahan, Pengobatan dan Rehabilitasi, Penegakan Hukum, Penelitian, dan Pengembangan Alternatif.⁷

ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025 merupakan kelanjutan dari inisiatif sebelumnya, yakni ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking and Use 2009-2015. Rencana ini diadopsi pada pertemuan ke-30 ASOD di Phnom Penh, Kamboja, pada tahun 2009. Sejalan dengan visi ASEAN Bebas Narkoba 2015, Rencana Kerja ASEAN 2009-2015 berfokus pada upaya untuk berhasil dan efektif menangani kegiatan narkoba ilegal serta

⁶ ASEAN Secretariat, *The ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025* (Jakarta: Community Relations Division, The ASEAN Secretariat, 2017), 4.

⁷ *Ibid.*, 5.

mengurangi dampak negatifnya pada masyarakat. Ini mencakup pencapaian yang signifikan dan berkelanjutan dalam (i) penanaman tanaman terlarang; (ii) produksi dan perdagangan narkotika ilegal serta kejahatan terkait narkotika; dan (iii) penurunan prevalensi penggunaan obat-obatan terlarang.⁸ Upaya-upaya yang dilakukan ASEAN dalam periode pertama program Drug-Free ASEAN 2009-2015 dapat dikatakan membuahkan hasil yang kurang memuaskan, karena memunculkan banyak perlawanan oleh para pelaku tindak kejahatan transnasional dan munculnya produk baru dari bahan-bahan mentah narkotika. Pencapaian ini dapat dilihat dalam dokumen berjudul "Drug Free ASEAN 2015: Evaluation and Recommendations Post-2015". Dalam laporan ini, disimpulkan bahwa keadaan narkoba di wilayah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, terutama terkait dengan laporan yang menunjukkan penyebaran metamfetamin dan jenis zat psikoaktif baru.⁹

Berlanjut pada program kerja yang telah diperbarui yaitu Drug-Free ASEAN 2016-2025, rencana kerja terbaru tersebut dibuat berdasarkan laporan-laporan dari negara ASEAN yang telah mengimplementasi berbagai macam kebijakan pemberantasan narkotika periode pertama. Sumber-sumber yang menjadi dasar dalam perumusan rencana Kerja ini termasuk Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN 2025 dan Laporan ASEAN Bebas Narkoba 2015: Evaluasi dan Rekomendasi Pasca-2015. Selain itu, Rencana Kerja ini juga merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja ASEAN periode 2009-2015 sebelumnya.¹⁰ Setelah melihat dan mengamati hasil dari program kerja periode sebelumnya dapat dikatakan upaya-upaya yang dilakukan sangatlah kurang karena lemahnya beberapa negara anggota ASEAN dalam melaksanakan serta mengimplementasikan rekomendasi upaya yang telah diciptakan oleh ASEAN, seperti contoh penerapan kebijakan yang dapat bertolak belakang dengan fungsi dari beberapa instansi beberapa negara dan kurangnya upaya pemerintahan negara untuk memberikan sosialisasi terhadap publik yang dimana dapat membantu mencegah penyebaran tindak kejahatan tersebut.

⁸ Ibid., 7.

⁹ Ibid., 7.

¹⁰ Ibid., 6

Selain itu terdapat juga rintangan yang menghambat beberapa upaya yang dilakukan, yaitu munculnya berbagai jenis narkoba baru dan cara baru para pelaku tindak kejahatan dalam mendistribusikan barang-barang ilegal yang membuat negara-negara perlu memperbarui atau memahami hal-hal tersebut demi memaksimalkan upaya yang dilakukan, dalam proses pengamatan tersebut membutuhkan waktu terbilang lama sehingga tidak dapat memberi kejelasan estimasi waktu hingga proses analisis telah selesai dilakukan.

Berlanjut pada evaluasi upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pembaharuan rencana kerja ASEAN berikutnya yaitu program Drug-Free ASEAN 2016-2025. Program kerja terbaru ASEAN ini merupakan bentuk dari berbagai hasil yang telah dicapai dari program sebelumnya yang berisikan berbagai macam evaluasi yang dapat dilakukan demi mencapai tujuan awal yang telah disepakati. Dalam pembentukan program kerja terbaru, terdapat beberapa usulan mengenai isi dari program kerja tersebut yang menyangkut kolaborasi antara negara-negara asia tenggara maupun antara instansi yang memiliki peran dalam melaksanakan upaya yang diinisiasi berupa: i) menganalisa secara rinci mengenai kondisi pergerakan dan jenis narkoba dari pasar gelap; ii) mempelajari serta mengevaluasi permasalahan yang muncul pada program kerja sebelumnya; iii) meningkatkan kerjasama multilateral dan kerjasama kolektif tanpa menghambat upaya maupun tindakan proaktif setiap individu dalam mengatasi permasalahan peredaran narkoba di setiap negara; iv) menggunakan berbagai pendekatan secara menyeluruh dan seimbang secara signifikan demi mengurangi pemasokan atau permintaan obat-obatan terlarang; v) merekatkan dan memperkuat hubungan antara negara anggota ASEAN untuk menciptakan kolaborasi yang efektif; vi) menetapkan beberapa target dan langkah-langkah dalam mencapai tujuan rencana kerja awal.

Dengan adanya persiapan yang dapat dikatakan matang untuk melanjutkan program kerja Drug-Free ASEAN selanjutnya, negara-negara anggota ASEAN menyetujui untuk melanjutkan program kerja tersebut dengan mengimplementasikan dan menyempurnakan hasil evaluasi komponen yang telah disimpulkan pada laporan hasil dari program kerja

sebelumnya. Berlanjut pada beberapa komponen yang telah dibentuk, berikut merupakan beberapa komponen dari pembaharuan program kerja yang pada akhirnya akan dibagikan dan diimplementasikan kepada negara-negara anggota ASEAN, i) general; ii) preventive education; iii) law enforcement; iv) treatment and rehabilitation; v) research; vi) alternative development; vii) extra regional coopertation.¹¹ Pada komponen-komponen tersebut mengandung banyak materi evaluasi yang dapat dijabarkan dan dijelaskan secara detail untuk memperjelas tujuan yang pada akhirnya dapat menghasilkan keefektifan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Melihat kembali pada penilaian akhir dari program sebelumnya yang telah dipantau, ditinjau, dan dievaluasi oleh United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC) di tahun 2014, menunjukkan bahwa situasi distribusi narkotika di kawasan asia tenggara semakin memburuk karena adanya laporan mengenai proliferasi metamfetamin dan zat psikoaktif baru yang muncul di pasaran (NPS). Dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah negara-negara anggota ASEAN memerlukan upaya pendekatan yang lebih holistik untuk menyelesaikan tantangan yang ditimbulkan oleh perdagangan gelap obat-obatan terlarang, selain itu melihat kurangnya badan-badan otoritas narkotika ASEAN yang memerlukan gerakan revolusi yang lebih luas tidak terpaku dalam pandangan one-dimensional dan lebih melakukan pendekatan multi-dimensional management approach.¹²

Setelah melihat berbagai upaya yang telah diimplementasikan pada program kerja sebelumnya, menciptakan upaya-upaya baru yang dapat dikembangkan melalui evaluasi secara menyeluruh dari berbagai komponen dasar program kerja tersebut. Melihat dasar dari komponen yang cukup kuat untuk membantu pengimplementasian upaya dan perubahan isi dari berbagai komponen yang mengikuti fleksibilitas dari analisis keadaan lapangan dari berbagai sumber. Pada dasarnya program kerja dalam periode 2016-2025 memiliki isi kandungan yang berfokus pada memperkuat kerjasama multilateral antar negara-negara anggota ASEAN. Dengan adanya tolak ukur yang pasti dari program kerja sebelumnya membuat

¹¹ Ibid., 7.

¹² UNODC, *Drug-Free ASEAN 2015: Status and Recommendations* (United Nations Office on Drugs and Crime Regional Centre for East Asia and the Pacific, 2008), 84.

ASEAN mampu menciptakan sebuah upaya untuk menyelesaikan permasalahan narkoba di kawasan asia tenggara. Memperkuat hubungan multilateral melalui metode memaksimalkan peran Asean Ministerial Meeting on Drugs (AMMD) dalam menangani koordinasi implementasi setiap negara anggota ASEAN secara komprehensif, koheren, dan efektif demi mewujudkan aspirasi Drug-Free ASEAN, dengan cara berkolaborasi dengan badan sectoral lain dalam hal berbagi informasi mengenai permasalahan narkoba dan masalah kesehatan terkait narkoba.

Dengan adanya berbagai informasi yang didapat mengenai distribusi narkoba yang sumber produksinya berasal dari wilayah golden triangle, negara-negara anggota ASEAN menyadari perlunya mengatasi ancaman tersebut secara berkelanjutan. Informasi yang telah didapatkan melalui berbagai sumber dapat dimanfaatkan secara efektif dengan menggabungkan manajemen resiko dan standar nasional mengenai tindakan pengendalian narkoba untuk mengurangi ancaman narkoba di setiap batas wilayah negara, selain itu setiap negara dapat melakukan peninjauan mengenai pengendalian obat nasional agar dapat mengidentifikasi tantangan terhadap pengendalian obat dan mengembangkan respon efektif yang sesuai dengan situasi keamanan negara. Instansi negara dapat memperkuat serta memanfaatkan sektor public, swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam menanggapi penyalahgunaan obat-obatan terlarang sehingga peran dari warga negara dapat lebih maksimal dalam permasalahan yang dihadapi. Tidak hanya badan-badan kemaanan negara yang dapat ditingkatkan, namun peningkatan pemahaman badan-badan nasional yang menangani obat-obatan dengan mengatur konektivitas regional mengenai pemasokan dan permintaan obat-obatan karena dapat menjadi titik lemah yang akhirnya berdampak pada ekonomi negara. Pengaturan konektivitas regional yang dilakukan dapat dilakukan melalui berbagai platform yang telah disediakan oleh ASEAN seperti pertemuan terkait ASOD dan pemantauan secara statistik obat-obatan terlarang dari pemasokan maupun permintaan melalui Asean Drug Monitoring Network (ADMN).

Meningkatkan partisipasi antara lembaga negara nasional yang terkait mengenai kejahatan transnasional baik dalam bidang pendidikan,

keamanan, kesehatan, dan masalah sosial dalam negeri untuk mengatasi tantangan pengendalian penyebaran narkotika di setiap negara.¹³ Pengendalian tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh setiap anggota negara ASEAN untuk mengatur pergerakan peredaran narkotika dan meningkatkan kesadaran masyarakat umum untuk mengetahui dampak yang akan terjadi apabila permasalahan tersebut terus meningkat. Setiap negara dapat melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam upaya menyadarkan pentingnya pemberantasan narkotika melalui pemanfaatan ruang public yang mencakup berbagai sektor seperti penegak hukum, pendidikan, kesehatan, lembaga sosial, dan keluarga sebagai bagian dari strategi untuk mencapai pengendalian obat-obatan terlarang secara keseluruhan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat umum dan petinggi negara melalui pelatihan, lokakarya, seminar lintas kementerian atau lintas lembaga negara untuk tetap menjaga lingkungan negara dari ancaman tersebut. Peningkatan kesadaran dapat dilakukan juga melalui penyelenggaraan kampanye pendidikan di seluruh wilayah negara, terutama batas wilayah negara yang rawan akan permasalahan penyelundupan narkotika dengan memberikan wawasan untuk membangun pertahanan generasi penerus bangsa terhadap narkoba. Salah satu upaya yang dapat diimplementasikan oleh setiap negara adalah gerakan green-and-white yang digunakan oleh Singapura sebagai simbol umum dari ASEAN untuk kegiatan pendidikan mengenai tindakan preventif dan kampanye melawan narkoba untuk generasi muda.¹⁴ Secara umum pemerintah dapat memanfaatkan ruang public untuk mengumumkan dan membuat kebijakan mengenai larangan atau hukuman yang diberikan terhadap kegiatan penyelundupan narkoba dalam penerbangan internasional maupun berbagai pos pemeriksaan perbatasan wilayah negara darat atau laut.

Setiap negara memiliki situasi atau kondisi tersendiri dalam permasalahan perdagangan obat-obatan ilegal, sehingga upaya meminimalisir permasalahan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan atau signifikan oleh pemerintahan atau badan keamanan negara.

¹³ Sekretariat, ASEAN WORK PLAN, 6.

¹⁴ Ibid., 11.

Peningkatan jumlah kegiatan investigasi ataupun operasi terkait narkoba, penyitaan perkusor, penangkapan distributor lapangan dapat membantu mengurangi pergerakan dan ancaman para pelaku tindak kejahatan yang pada akhirnya peredaran yang terjadi dalam negeri dapat berkurang secara signifikan.¹⁵ Dengan ditingkatkannya jumlah operasi tersebut, dapat menciptakan sebuah efek berkelanjutan seperti mendapatkan informasi mengenai trayek distribusi perdagangan, jumlah serta lokasi fasilitas produksi obat-obatan terlarang, dan letak lahan budidaya ilegal di dalam negara. Peningkatan kapasitas serta kekuatan personel penegak hukum dan badan pengawas di bidang penngendalian prekursor dapat membantu setiap negara dalam mengidentifikasi popularitas jenis obat-obatan dan menganalisis data yang pada akhirnya dapat dilaporkan kepada badan pengawasan obat-obatan ASEAN. Dalam upaya memperkuat keamanan nasional, ASEAN dapat menjadi jembatan untuk berbagi informasi mengenai profil sindikat kejahatan narkoba serta daftar pemantauan aktivitas distribusi narkoba melalui pertemuan ASOD.¹⁶

Berbicara mengenai transparansi data dalam permasalahan obat-obatan ilegal, pemerintahan negara memiliki peran penting untuk mengupayakan peningkatan akses terhadap keadilan yang seadil-adilnya bagi semua individu di kawasan ASEAN dengan menghormati kedaulatan, kebijakan nasional masing-masing negara. Peningkatan tata kelola mengenai keadilan dengan menerapkan pendekatan yang transparan dalam penegakan hukum permasalahan tersebut, dapat membantu berbagai individu secara luas. Selain ASEAN yang dapat menerima informasi hasil dari berbagai operasi badan penegak hukum, pemerintah dapat memanfaatkan berbagai media untuk membagikan hasil tersebut agar masyarakat umum percaya dan mengetahui peran penting pemerintah dalam menangani permasalahan perdagangan narkoba. Pemerintah dapat melakukan publikasi hasil statistic penegakan hukum narkoba, mengiklankan program nasional melawan narkoba, dan memastikan semua data dapat diakses atau tersedia untuk masyarakat umum melalui website resmi pemerintahan ¹⁷ Terlepas

¹⁵ Ibid., 14.

¹⁶ Ibid., 16.

¹⁷ Ibid., 19.

dari permasalahan perdagangan narkotika, permasalahan mengenai korupsi oknum-oknum pemerintahan maupun penegak hukum dapat mempengaruhi keamanan negara di batas wilayah negara. Dengan adanya titik lemah tersebut, ASEAN memberikan solusi untuk permasalahan yang mungkin dialami setiap negara dengan memperkuat mutual legal assistance (MLA), memperkuat cross-border liaison offices (BLOs) dan badan intelejen perbatasan wilayah udara, laut dan darat.¹⁸ Berlanjut pada proses rehabilitasi dan perlakuan setiap individu yang terjaring permasalahan narkotika seperti pengguna dan pengedar.

Pemerintah dapat melakukan peningkatan akses terhadap rehabilitasi, pengobatan, dan layanan pasca perawatan bagi setiap individu yang terkait permasalahan narkotika. Peningkatan yang dimaksud dapat dimulai dari segi aksesibilitas, meningkatkan luas cakupan pengobatan dan perluasan jaringan sosial bagi para pelaku agar mendapatkan ruang atau aksesibilitas atas layanan pengobatan menyeluruh. Modal rehabilitasi dan perawatan setiap individu dapat menjadi salah satu kekhawatiran para korban untuk berani mengambil jalan tersebut, dimana dapat mempengaruhi efektifitas upaya pemberantasan narkotika. Maka dari itu, pemerintah dapat menyediakan maupun mendukung berbagai modalitas pengobatan atau rehabilitasi bagi kelompok pengguna tertentu yang berdasarkan dari jenis narkotika yang disalahgunakan. Pemerintah negara dapat mengadaptasi program-program perawatan dan rehabilitasi seperti melakukan pengobatan bagi pelaku di dalam lembaga penahanan, mengembangkan program pengobatan bagi kelompok masyarakat yang spesifik, dan mengadopsi protokol pengobatan berstandar internasional sesuai dengan situasi negara maupun kebijakan setiap negara anggota ASEAN.¹⁹ Program berkelanjutan yang dapat diterapkan oleh pemerintahan negara menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan efektifitas upaya yang sedang dilakukan seperti memperluas program pengawasan korban berbasis komunitas, mengoptimalkan keterlibatan keluarga atau masyarakat dalam proses pengawasan, dan menyediakan layanan purna perawatan bagi pengguna

¹⁸ Ibid., 19.

¹⁹ Ibid., 22.

yang telah direhabilitasi agar mendapatkan kembali integritas sosial masing-masing korban.

Selain memberikan rekomendasi upaya yang harus dilakukan oleh setiap negara anggota ASEAN, ASEAN memberikan beberapa upaya alternative yang dapat diterapkan. Memberantas semua wilayah budidaya tanaman illegal berkelanjutan sesuai dengan pedoman United Nations Guiding Principles.²⁰ Mengalokasikan dana dan pertanggung jawaban dari pemerintah pusat maupun swasta kepada Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memberikan dukungan kepada masyarakat atau petani di setiap daerah agar dapat meminimalisir budidaya tanaman illegal. Meningkatkan hubungan kemitraan dengan pemangku kepentingan yang terkait, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan swasta atau pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat. Memperkuat supremasi hukum dalam hal keamanan negara, karena tata pemerintahan yang baik dan terpercaya dapat menciptakan lingkungan kondusif yang pada akhirnya dapat meningkatkan stabilitas, perdamaian, dan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan. Dengan adanya upaya alternative yang direkomendasikan oleh ASEAN, upaya-upaya tersebut tidak akan mendapatkan feedback yang maksimal apabila tidak diimbangi dengan survey kepada masyarakat umum terutama petani yang memiliki pengetahuan lebih mengenai persoalan budidaya tanaman. ASEAN juga merekomendasikan upaya penggunaan teknologi satelit dan drone untuk negara-negara yang memiliki perkembangan teknologi secara signifikan agar mendapatkan informasi secara luas dan maksimal.

Upaya kerjasama regional secara efektif dapat mempengaruhi berbagai upaya yang dilakukan setiap negara, komunikasi secara maksimal diperlukan untuk membantu melacak perkembangan dari perpgerakan distribusi narkoba di wilayah tersebut. Dari segi kerjasama regional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi mekanisme pendanaan merupakan salah satu upaya utama dalam menerapkan upaya lainnya seperti memfasilitasi kerja sama regional dan mendukung badan-badan yang terkait dalam lingkup nasional untuk melaksanakan proyek yang dibutuhkan. Mendukung dan mengadopsi kerangka strategi kerja sama

²⁰ Ibid., 26.

yang mencakup berbagai bagian pemerintahan dan organisasi internasional lainnya, guna menciptakan kerangka kerja yang dinamis dalam memantau kemajuan upaya yang dilakukan, meningkatkan kerja sama regional, menajlin hubungan dengan negara non-ASEAN, dan mobilisasi sumber daya.²¹ Dengan adanya upaya-upaya yang telah dikembangkan oleh ASEAN untuk setiap anggota negara ASEAN, dapat mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk ikut berpartisipasi dalam forum terkait PBB, terutama pertemuan Heads of National Drug Law Enforcement agencies (HONLEA) untuk menunjukkan rasa solidaritas dan persatuan negara-negara ASEAN.

KESIMPULAN

Perkembangan Program Drug-Free ASEAN mencerminkan langkah positif dalam upaya menciptakan masyarakat bebas narkoba di kawasan Asia Tenggara. Inisiatif ini menunjukkan tekad kolektif sepuluh negara anggota ASEAN untuk mengatasi tantangan serius yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Upaya bersama dalam pertukaran intelijen, penguatan perbatasan, dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum menjadi kunci untuk meredam laju penyalahgunaan narkoba. Faktor ekonomi, sosial, dan politik yang terkait dengan peredaran narkoba tetap menjadi hambatan, dan penyelesaian yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Diplomasi regional dan kolaborasi internasional menjadi kunci untuk menanggapi permasalahan narkoba yang melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Dengan memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi dan terus meningkatkan kolaborasi, ASEAN berada di jalur yang tepat untuk mencapai visi masyarakat bebas narkoba di kawasan Asia Tenggara. Dapat dikatakan bahwa upaya yang direkomendasikan ASEAN mampu meminimalisir permasalahan narkotika di kawasan Asia Tenggara dan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keberhasilan tersebut.

²¹ Ibid., 35.

DAFTAR PUSTAKA

- United Nations Office on Drugs and Crime. 2007. "Drug-free ASEAN by 2015: Status and Recommendation." UNODC. https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/ASEAN_2015.pdf.
- ASEAN Secretariat, The ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025 (Jakarta: Community Relations Division, The ASEAN Secretariat, 2017), 4.
- Letizia Charissa Sigalingging, Upaya Indonesia Mewujudkan Drug-Free ASEAN 2015 (Pekanbaru: 2015), 4.
- Lintner Bertil, *The golden triangle opium trade: An overview. Asia Pacific Media Services* (Chiang Mai: 2000), 9-10.
- Pardo, Bryce, Beau Kilmer, and Wenjing Huang. 2019. "Contemporary Asian Drug Policy." (RAND Corporation) 35. Accessed 1103, 2023
- Saryono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Alfabeta, 2010), 5.
- Secretariat, ASEAN WORK PLAN, 6.
- UNODC, Drug-Free ASEAN 2015: Status and Recommendations (United Nations Office on Drugs and Crime Regional Centre for East Asia and the Pacific, 2008), 84.
- UNODC, *Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact* (UNODC, UNODC Research, 2019), 6.
- Wagley, *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses* (Congressional Research Service, The Library of Congress, 2006).